

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah ialah bagian dari demokratisasi yang di dalamnya menciptakan sebuah sistem yang powershare pada setiap level pemerintahan dan juga menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Adanya distribusi kewenangan/kekuasaan, disesuaikan dengan kewenangan pusat dan daerah termasuk kewenangan keuangan. Guna melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, diperlukan informasi akuntansi, yang salah satunya berupa laporan keuangan. Sesuai dengan adanya ketentuan dan peraturan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah daerah berkewajiban guna menciptakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang terdiri dari Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Nota perhitungan anggaran. Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus dapat menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem akuntansi yang andal (Yulistia, 2017).

Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa aplikasi SIPPKD Versi 2 ini telah mengakomodir berbagai peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD 2021 selaras dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perubahan regulasi ini menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terutama perubahan struktur APBD, klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut.

Dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 pasal 232 yang menyatakan bahwa SAKD merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Sedangkan menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal (70) ayat (1) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengelolaan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian uang serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum dan yang dilakukan dengan cara manual maupun dengan cara aplikasi. Proses akuntansi tersebut didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar apabila diperlukan maka perlu ditambah dengan buku besar pembantu. Hal ini membuktikan jelas bahwa sistem akuntansi sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah lemah akan menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meliputi: *Validity*, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi. *Reliability*, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya. Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya dan kegunaan SAKD selanjutnya adalah Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal (Carolina, 2013). Agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD ini maka perlu adanya faktor perilaku dalam suatu organisasi yang mendukung dalam penerapan SAKD tersebut (Kayati, 2016).

Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (Izzah, 2018). Agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD ini maka perlu adanya faktor perilaku dalam suatu organisasi yang mendukung dalam penerapan SAKD tersebut (Kayati, 2016) diantaranya adanya pelatihan, kejelasan tujuan suatu organisasi serta adanya dukungan atasan dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD tersebut dalam memenuhi tuntutan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga sektor publik, karena SAKD dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun fenomena yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, dimana pada tahun 2019 dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang system akuntansi pemerintahan. Serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara menyusun kebijakan akuntansi dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014. Terkait hal tersebut, Koordinator Investigasi Kaki Publik, mengungkapkan, perangkat regulasi yang diterbitkan Pemkab Lampung Utara tidak mendukung penerapan SAP berbasis akrual. Periode perhitungan penyusunan asset tidak ditetapkan. Kebijakan akuntansi tidak mengatur belanja dibayar di muka dan diterima di muka. Permasalahan timbul akibat perangkat regulasi akuntansi tidak mendukung SAP. Maka muncul perbedaan persepsi di masing-masing SKPD pencatat asset tetap. Termasuk belanja dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Konsistensi dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas pos-pos tersebut menjadi tidak terjamin. Penyebab permasalahan tersebut adalah, bidang akuntansi BPKA tidak mengusulkan pengaturan waktu penyusutan asset tetap. Juga belanja dibayar dimuka dan pendapatan diterima dimuka dimana kondisi tersebut bertolak belakang dengan PP 71 Tahun 2010 (<https://www.klikanggaran.com/>, 2019).

Menurut Robbins & Judge (2016) perilaku organisasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan SAKD merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas APBD. Dari visi dan misi organisasi, kita dapat melihat adanya tujuan dalam organisasi. Jika pelaksanaan tujuan organisasi dalam bentuk SAKD tidak dijalankan dengan baik dan didukung secara aktif oleh atasan, maka penerapan sistem akuntansi keuangan tidak akan banyak membantu dalam mewujudkan tujuan transparansi organisasi, dan proses tersebut harus dilakukan di luar. Mengatur pencapaian semua anggota dalam pekerjaannya.

Faktor berperilaku organisasi yang pertama mengacu pada pelatihan. Menurut Rozalena & Dewi (2017) program pelatihan merupakan solusi terbaik karyawan untuk mengembangkan kariernya. Sudah seharusnya para pimpinan, supervisor, ataupun manager memutuskan program pelatihan yang tepat untuk dijalankan. Hal penting yang harus diingat adalah pemilihan metode pelatihan yang tepat untuk dijalankan. Sedangkan Kayati (2016) berpendapat bahwa pelatihan dalam desain, implementasi dan penggunaan suatu inovasi seperti adanya sistem baru memberikan kesempatan bagi organisasi untuk dapat mengartikulasikan hubungan antara implementasi sistem baru tersebut dengan tujuan organisasi serta menyediakan suatu sarana bagi pengguna untuk dapat mengerti, menerima dan merasa nyaman dari perasaan tertekan atau perasaan khawatir dalam proses implementasi.

Faktor berperilaku organisasi yang kedua mengacu pada kejelasan tujuan. Kejelasan tujuan ini dapat menentukan keberhasilan sistem akuntansi keuangan, karena orang dengan tujuan yang jelas, tujuan yang jelas, dan pemahaman tentang cara mencapainya, dapat menggunakan keterampilan dan kemampuannya untuk melakukan tugas (Yuliana, 2012). Sedangkan menurut Kayati (2016) kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu

kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan dari anggota organisasi yang dominan, yang secara kolektif mempunyai kendali yang mencukupi atas sumber daya organisasi untuk membuat komitmen atas arah tertentu (Sari, 2017).

Faktor berperilaku organisasi yang kedua mengacu pada dukungan atasan, Menurut Kayati (2016) dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Manajer (atasan) dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila manajer (atasan) mendukung sepenuhnya dalam implementasi. Dukungan manajemen atasan merupakan faktor penting dalam menentukan efektifitas penerapan atau implementasi sistem informasi dalam organisasi. Dengan adanya keterlibatan atasan dalam kemajuan organisasi dan menyediakan sumber daya yang diperlukan maka akan dapat menentukan keberhasilan penerapan suatu sistem. Apabila sebuah organisasi dalam mengimplementasikan sistem tidak didukung oleh atasan maka tujuan tersebut tidak akan tercapai (Manasikana, 2019).

Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Suwignyo (2019) bahwa pelatihan dan kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Penelitian oleh Khaulia dkk (2019) menyatakan bahwa dukungan atasan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina dkk (2019) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Kayati (2016) terdapat pengaruh positif dan signifikan pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Sedangkan penelitian Susilawati (2018) dalam penelitian tentang pengaruh faktor perilaku organisasi terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (Studi SKPD Kabupaten Sleman). Faktor perilaku seperti pelatihan, dukungan yang unggul, dan tujuan yang jelas akan mempengaruhi efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah. Memberikan pelatihan yang lebih baik, tujuan yang jelas dan dukungan yang sangat baik akan meningkatkan kepraktisan sistem akuntansi keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Manasikana (2019) menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi sistem keuangan desa. kejelasan tujuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi sistem keuangan desa. sedangkan dukungan atasan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap implementasi sistem keuangan desa. Penelitian Ervin (2021) yang menunjukkan bahwa kejelasan tujuan, pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Sedangkan dukungan atasan tidak berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Hadillia (2020). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, perbedaan tersebut antara lain populasi penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Utara. Dan yang dipilih dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntansi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Utara yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintah dibidang keuangan untuk disusun menjadi sebuah skripsi dengan judul ***“Pengaruh Faktor Keperilakuan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Utara”***. (Studi empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara)

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memfokuskan penelitian ini agar mempunyai ruang lingkup dan arah penelitian yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Variabel berperilaku organisasi dalam penelitian ini adalah pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan.
2. Subjek yang di pilih dalam penelitian ini adalah pengguna sistem akuntansi keuangan daerah
3. Objek dari penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung Utara

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh faktor pelatihan dalam organisasi terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh faktor kejelasan tujuan dalam organisasi terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh faktor dukungan atasan dalam organisasi terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh faktor berperilaku organisasi memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh faktor kejelasan tujuan dalam organisasi memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh faktor berperilaku dukungan atasan memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat membantu atau memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah, yang menetapkan bahwa sistem akuntansi harus transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab, melalui pelatihan, tujuan faktor perilaku yang jelas, dukungan yang unggul dan komitmen, serta organisasi sebagai penunjang untuk meningkatkan efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini merupakan sarana untuk mengembangkan pengetahuan akuntansi dengan menerapkan teori-teori yang diperoleh di program studi universitas.

- b. Manfaat bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah yang sudah ditetapkan.

- c. Manfaat bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi dan rangkuman terkait dengan penelitian yang dilakukan, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan bangunan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data, pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi data (deskripsi objek penelitian, deskripsi variabel penelitian), hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini yang berisi simpulan, dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain, dan bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan skripsi.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atau uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Data tersebut dapat berupa gambar, table, formulir ataupun flowchart.